



DKI: Belum Ada Wacana Kenaikan Tarif

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan rencana kenaikan tarif Transjakarta baru usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan belum ada rencana kenaikan tarif Transjakarta. Sebagian masyarakat menolak usulan itu, tetapi ada pula yang mendukung lantaran telah bertahun-tahun tarifnya tak pernah berubah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, belum ada wacana kenaikan tarif Transjakarta. Sejauh ini, gagasan penyesuaian harga layanan bersumber dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

"Belum ada wacana terkait kenaikan tarif Transjakarta," ujar Syafrin secara tertulis saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Syafrin melampirkan surat berisi rekomendasi penyesuaian tarif oleh DTKJ yang tertulis pada 27 Maret 2023. Pihak DTKJ mengajukan surat pada Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berisi usulan penyesuaian tarif Transjakarta bersubsidi. Alasannya, harga layanan belum pernah mengalami peninjauan dan penyesuaian sejak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No 1912 Tahun 2005. Selain itu, perubahan dapat dilakukan setelah pandemi Covid-19 usai.

Seiring membaiknya kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi, DTKJ akhirnya kembali merekomendasikan penyesuaian tarif Transjakarta dengan sejumlah pertimbangan. Selain soal kehidupan masyarakat setelah pandemi, penyesuaian tarif dinilai perlu disesuaikan pula dengan perkembangan kualitas layanan Transjakarta.

Adanya layanan integrasi tarif Jaklingko antarpelayanan

gara transportasi di bawah pemerintah DKI Jakarta (MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta) turut jadi tambahan pertimbangan lain. DTKJ pun merekomendasikan penyesuaian tarif pelanggan berdasarkan waktu pelayanan serta jenis kendaraan.

Dalam suratnya, DTKJ menyebutkan layanan pada waktu sibuk (07.01-10.00 dan 16.01-21.00), tiap pelanggan diusulkan membayar Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 3.500. Di luar jam itu, pihaknya akan menetapkan tarif menjadi Rp 4.000 per pelanggan.

Masyarakat yang sebelumnya tak perlu merogoh kocek sepeser pun ketika menggunakan mikrotrans atau angkot Jaklingko juga akan terdampak penyesuaian tarif. DTKJ mengusulkan agar tiap penumpang dikenakan Rp 1.000. Hal serupa juga berlaku bagi tarif integrasi antarmoda Jaklingko Indonesia yang naik jadi Rp 10.000 per pelanggan.

Seiring peningkatan tarif, DTKJ merekomendasikan peningkatan pelayanan serta optimalisasi pendapatan di luar tiket (*non-fare box revenue*).

Sebelumnya, Rikobimo Ridjal Badri, mantan anggota Komisi Tarif dan Pembiayaan Dewan Transportasi Kota Jakarta, menuturkan, survei yang berjalan sudah sesuai dengan skema yang direkomendasikan. Ada tarif Rp 5.000 saat jam sibuk dan tarif Rp 4.000 untuk jam biasa.

"Pertimbangan utama memang belum penyesuaian tarif dan mencermati survei yang pernah dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Perbaikan layanan juga menjadi

poin yang disampaikan bersamaan dengan rekomendasi penyesuaian tarif," kata Rikobimo yang masa tugasnya rampung per 1 April 2023.

Kompas telah berupaya menghubungi Ketua DTKJ Harris Muhammadun. Namun, hingga berita ini ditulis, ia belum merespons pesan yang telah dikirimkan.

Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, kenaikan harga memang sesuatu yang alami. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat mencari terobosan agar tarif tak membebani masyarakat, tetap terasa murah.

"Mahal, tapi terasa murah, itu yang seharusnya dicari jalannya," kata Piter.

Ia menyarankan agar tiket Transjakarta dijual secara paket (*bundling*). Skema ini akan memudahkan masyarakat yang sehari-hari menggunakan Transjakarta ketimbang pelanggan yang jarang memakainya. Alhasil, ketika masyarakat menggunakan berulang kali, tarif akan tetap terasa murah. Model semacam ini juga digunakan transportasi umum lain, seperti di London, Inggris.

Piter menambahkan, biaya transportasi masyarakat tak hanya digelontorkan untuk Transjakarta. Untuk menuju halte, mereka masih harus menggunakan transportasi lain, seperti ojek.

Pemprov DKI Jakarta semestinya melakukan survei menghitung total yang harus dikeluarkan masyarakat untuk transportasi tiap bulan. "Hitungan saya berkisar 10-25 persen dari *income* mereka untuk transportasi. Itu besar sekali,"

kata Piter.

Terobosan harus dicari agar tarif Transjakarta tetap murah sehingga masyarakat terus memanfaatkan transportasi publik. Apalagi rata-rata pengguna Transjakarta berasal dari kelas menengah-bawah sehingga bantuan ongkos transportasi dinilai dapat mengurangi beban pengeluarannya. Sebab, mereka tak ada pilihan selain memanfaatkan transportasi umum.

Respons pelanggan

Isu kenaikan tarif Transjakarta mendapat beragam respons dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Ada yang mendukung, tetapi tak sedikit pula yang menyangkan jika keputusan ini diambil.

Salah seorang pelanggan bus Transjakarta, Panca (35), setuju apabila tarif layanan transportasi umum ini naik. Ia menilai wajar ada kenaikan tarif lantaran inflasi terjadi tiap tahun. Hal ini tak mengubah keputusannya untuk tetap menggunakan transportasi umum.

Pelanggan lain, Arma (30), setuju jika harga layanan Transjakarta naik menjadi Rp 4.000. Ia menolak jika nominal yang dipatok lebih dari itu. Sebab, banyak pelanggan ke halte bus terdekat masih harus naik ojek dengan ongkos sekitar Rp 15.000 sekali jalan. Apabila wacana ini terwujud, pelanggan akan merogoh kocek hampir Rp 40.000 per hari.

"Terlalu berat, ya, menurut saya karena masih harus bayar (sewa) kos juga," kata Arma. Ia berencana beralih ke moda transportasi lain, yakni mikrotrans, jika kenaikan tarif Transjakarta terlalu membebani.

(Z17/HLN)